



PEMIMPIN ATAU TUAN: MENAGIH KEMBALI ETIKA KEKUASAAN NICCOLÒ MACHIAVELLI DALAM BINGKAI RES PUBLICA

Ario Sukbandoro¹, Yudhi Hertanto²

Akper Berkala Widya Husada Jakarta¹, Universitas Islam Sultan Agung²

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 15/05/2026; Direvisi: 22/05/2026; Diterbitkan: 07/06/2026

ABSTRAK

Keberadaan Niccolò Machiavelli dalam diskursus politik modern sering direduksi sebagai simbol kelicikan dan amoralitas kekuasaan melalui istilah Machiavellianisme, sehingga menempatkan pemikirannya seolah identik dengan praktik politik yang menghalalkan segala cara. Padahal, pembacaan yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa Machiavelli memiliki perhatian besar terhadap stabilitas negara, supremasi hukum, dan kepentingan umum (*res publica*). Artikel ini bertujuan untuk menelaah kembali etika kekuasaan Machiavelli dengan membedakan orientasi kepemimpinan antara pemimpin yang membangun institusi demi kepentingan publik dan tuan atau tiran yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana dominasi personal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat analitis-deskriptif melalui pembacaan hermeneutika sejarah terhadap *Il Principe* dan *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, serta didukung literatur akademik mengenai republikanisme Machiavelli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua karya tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan merepresentasikan dua konteks politik yang saling melengkapi, yakni kepemimpinan personal pada situasi krisis dan pemerintahan berbasis hukum pada kondisi stabil. Temuan lain menunjukkan bahwa Machiavelli membedakan pemimpin dan tuan berdasarkan orientasi penggunaan kekuasaan, serta memahami korupsi politik sebagai pembusukan *civic virtue* yang melemahkan institusi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa etika Machiavelli lebih tepat dipahami sebagai etika tanggung jawab publik yang menempatkan legitimasi kekuasaan pada kemampuan menjaga stabilitas, institusi, dan keberlangsungan kehidupan bersama.

Kata Kunci: *Niccolò Machiavelli, Etika Kekuasaan, Res Publica, Virtù, Kepemimpinan Politik*

ABSTRACT

The presence of Niccolò Machiavelli in modern political discourse is often reduced to a symbol of cunning and the amorality of power through the term Machiavellianism, thereby positioning his thought as synonymous with political practices that justify any means to achieve power. However, a more comprehensive reading demonstrates that Machiavelli was deeply concerned with state stability, the rule of law, and the public good (*res publica*). This article aims to reexamine Machiavelli's ethics of power by distinguishing the orientation of leadership between a leader who builds institutions for the public interest and a master or tyrant who employs power as an instrument of personal domination. This study employs a qualitative method using an analytical-descriptive library research approach through a historical-hermeneutic reading of *Il Principe (The Prince)* and *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discourses on Livy)*, supported by academic literature on Machiavellian republicanism. The findings indicate that these two works are not contradictory; rather, they represent two complementary political contexts, namely personal leadership during times of crisis and law-



based governance under stable conditions. Other findings reveal that Machiavelli distinguishes between a leader and a tyrant based on the orientation of power, while political corruption is understood as the corruption of *civic virtue* that weakens public institutions. This article concludes that Machiavelli's ethics is more appropriately understood as an ethic of public responsibility, in which political legitimacy rests on the capacity to maintain stability, institutions, and the continuity of collective life.

Keywords: *Niccolò Machiavelli, Ethics of Power, Res Publica, Virtù, Political Leadership*

PENDAHULUAN

Eksistensi Niccolò Machiavelli dalam diskursus populer kerap direduksi menjadi simbol manipulasi politik dan pengkhianatan kekuasaan. Istilah Machiavellian bahkan digunakan untuk menggambarkan praktik politik yang manipulatif, instrumental, dan berorientasi pada kepentingan pribadi yang mengabaikan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan (Li et al., 2024). Pembacaan ini cenderung menyederhanakan pemikiran Machiavelli dan mengabaikan konteks historis serta horizon politik yang melatarbelakanginya. Sebagaimana dijelaskan Skinner, Machiavelli bukan sekadar apologis kekuasaan, melainkan sekretaris Florentine yang memiliki komitmen pada republikanisme serta keprihatinan atas rapuhnya stabilitas politik Italia abad ke-16. Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa pemikirannya berorientasi pada stabilitas politik melalui institusi republik, pengendalian elite, dan pengelolaan konflik sosial (McCormick, 2021). Dengan demikian, reduksi Machiavelli sebagai legitimasi amoralitas politik menimbulkan persoalan apakah ia membenarkan dominasi personal atau justru keberlangsungan kehidupan politik bersama. Pembacaan komplementer terhadap *Il Principe* dan *Discorsi* memperlihatkan perhatian pada tatanan politik, kepentingan bersama, dan keberlanjutan institusi (Maity et al., 2024), sementara *Il Principe* juga dapat dibaca sebagai refleksi tentang legitimasi negara dan stabilitas politik, bukan sekadar manual dominasi (Vatter, 2025).

Krisis politik Italia berupa fragmentasi negara-kota, konflik internal, dan intervensi asing membentuk realisme politik Machiavelli (Vujadinovic). Realisme ini lahir dari kebutuhan menjaga ketahanan institusi dan adaptasi terhadap perubahan politik, bukan idealisme normatif (Burelli, 2023). Politik karena itu dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan *lo stato* di tengah ancaman disintegrasi. Skinner menambahkan bahwa kegagalan stabilitas politik Italia membuat Machiavelli skeptis terhadap moralitas politik yang terpisah dari realitas. Kajian mutakhir juga menegaskan bahwa realisme politik tidak menghapus normativitas, melainkan menilai politik berdasarkan kemampuan menjaga keteraturan dan keberlanjutan keputusan kolektif (Burelli, 2022; Dymond, 2025). Sejalan dengan itu, Machiavelli dipahami sebagai respons pragmatis terhadap ketidakstabilan politik, di mana keberhasilan ditentukan oleh kemampuan adaptif dan realistis (Boñol, 2026).

Namun demikian, realisme Machiavelli tidak berarti penolakan etika. Berlin menegaskan adanya ketegangan antara moralitas personal dan kebutuhan politik, sehingga politik merupakan arena konflik nilai. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa realisme politik tidak menghapus etika, melainkan merekonstruksi cara kerja pertimbangan moral dalam konteks politik yang kompleks (Sleat, 2022). Machiavelli menawarkan bentuk moralitas politik yang berfokus pada tanggung jawab menjaga ketertiban publik, di mana normativitas politik terkait dengan stabilitas negara dan bukan moralitas individual (Leader Maynard, 2021; Burelli, 2023).

Perdebatan akademik menunjukkan ketegangan interpretatif antara *Il Principe* sebagai legitimasi kekuasaan koersif dan *Discorsi* sebagai ekspresi republikanisme. Kajian mutakhir



juga menegaskan bahwa isu konsistensi gagasan Machiavelli masih diperdebatkan, khususnya terkait kebebasan, republik, dan kekuasaan (Regent, 2022). Namun, pembacaan republikan menilai kedua karya tersebut konsisten dalam menekankan stabilitas melalui institusi, hukum, dan keseimbangan sosial (McCormick, 2021). Meski demikian, pembacaan Machiavelli masih dominan pada realisme politik, sementara dimensi etika tentang pemimpin publik versus penguasa dominatif belum banyak dieksplorasi.

Dalam kerangka tersebut, Machiavelli menawarkan konsep seperti teori *humours* yang melihat konflik rakyat dan elite sebagai dinamika konstitutif bagi hukum dan kebebasan (Zuckert). Konflik tidak dihapus, tetapi dikelola melalui institusi republik agar menghasilkan keteraturan (Mendes, 2024; Silva & Morais, 2021). Konsep *virtù*, *fortuna*, dan *necessità* menunjukkan bahwa kepemimpinan menuntut kemampuan adaptif dalam situasi krisis (Mansfield; Skinner; Burelli, 2023). Pada akhirnya, orientasi Machiavelli berpuncak pada *res publica*, yakni kepentingan bersama yang dijaga melalui hukum untuk mencegah dominasi kelompok tertentu (Corradetti, 2025).

Berangkat dari hal tersebut, artikel ini meninjau kembali etika kekuasaan Machiavelli dengan membedakan pemimpin yang membangun institusi demi kepentingan publik dan penguasa yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen pribadi. Berlin menegaskan bahwa Machiavelli tidak memisahkan politik dari etika, melainkan menempatkannya sebagai tanggung jawab publik yang berbeda dari moralitas privat. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa problem utama Machiavelli terletak pada ketegangan antara moralitas pribadi dan kewajiban politik untuk menjaga ketertiban bersama (Giorgini, 2023). Kebaruan artikel ini terletak pada rekonstruksi Machiavelli sebagai pemikir etika kekuasaan republikan yang mengaitkan legitimasi kepemimpinan dengan perlindungan *res publica*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat analitis-deskriptif untuk menelaah secara kritis pemikiran politik Niccolò Machiavelli mengenai etika kekuasaan (Zainudin, 1992). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi konseptual terhadap gagasan, argumentasi, dan orientasi etik-politik yang terkandung dalam karya-karya Machiavelli, bukan pada pengukuran empiris. Objek utama penelitian berupa teks primer Niccolò Machiavelli, khususnya *Il Principe (The Prince)* dan *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discourses on Livy)*, yang diposisikan sebagai sumber utama untuk memahami konsepsi kepemimpinan, kekuasaan, dan kepentingan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah dokumen terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan, di mana data primer dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep sentral seperti *virtù*, *fortuna*, *necessità*, *humours*, *res publica*, dan *lizenzia* sebagai basis interpretasi etika kekuasaan, sedangkan data sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, dan karya interpretatif mengenai Machiavelli, republikanisme, serta etika politik digunakan untuk memperkuat pembacaan konseptual sekaligus menempatkan argumen penelitian dalam perdebatan akademik yang lebih luas.

Analisis data dilakukan melalui teknik hermeneutika sejarah (*historical hermeneutics*), yaitu pembacaan teks dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik Italia abad ke-16 yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran Machiavelli (Suh, 2012). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, pembacaan tekstual terhadap argumentasi Machiavelli dalam *Il Principe* dan *Discourses on Livy* untuk mengidentifikasi pandangannya mengenai relasi kekuasaan, kepemimpinan, dan kepentingan umum. Kedua, interpretasi historis dilakukan dengan

menempatkan gagasan tersebut dalam konteks fragmentasi politik, konflik antar negara-kota, dan ancaman dominasi asing di Italia. Ketiga, hasil pembacaan dikontekstualisasikan dengan interpretasi republikanisme modern, terutama pemikiran Quentin Skinner, Maurizio Viroli, dan Isaiah Berlin, guna menelaah kembali relevansi etik-politik Machiavelli dalam membedakan kepemimpinan yang berorientasi pada *res publica* dari kekuasaan yang berwatak dominatif dan personalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pembacaan terhadap *Il Principe* dan *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* menunjukkan bahwa kedua karya Niccolò Machiavelli tidak menghadirkan model kepemimpinan yang saling bertentangan, melainkan merepresentasikan dua konteks politik yang berbeda dalam menjaga keberlangsungan negara. Dalam *Il Principe*, figur pemimpin tunggal tampil sebagai aktor sentral yang diperlukan ketika negara berada dalam situasi krisis, seperti konflik internal, ancaman eksternal, atau fase pembentukan tatanan politik baru. Pada situasi demikian, stabilitas negara bergantung pada kemampuan seorang pemimpin menggunakan *virtù* untuk memulihkan keteraturan dan mengendalikan ketidakpastian politik. Sebaliknya, *Discorsi* memperlihatkan bahwa setelah stabilitas tercapai, keberlanjutan negara tidak lagi diletakkan pada figur individual, melainkan pada supremasi hukum, institusi politik, dan partisipasi warga negara. Dengan demikian, hasil pembacaan menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari kepemimpinan personal menuju tata politik institusional yang berfungsi menjaga kesinambungan negara secara lebih stabil. Perbedaan orientasi tersebut dapat dilihat melalui perbandingan karakteristik model prinsipalitas dan model republikan berikut.

Tabel 1. Perbedaan Analitis Model Kepemimpinan Machiavelli

Indikator	Model Pangeran (Prinsipalitas)	Model Republikan (Discorsi)	Keterangan Sumber
Konteks	Masa Krisis / Pendirian Negara.	Masa Stabil / Pelestarian Negara.	(Machiavelli, 1513, 1517)
Tujuan Utama	Keamanan dan stabilitas internal.	Kebebasan sipil dan ekspansi.	(Viroli, 1998; Vujadinovic, 2014)
Aktor Kunci	Pemimpin tunggal yang heroik.	Kolektivitas warga dan hukum.	(Mansfield, 1996; Skinner, 1981)
Metode	Kekuatan personal (<i>Virtù</i>).	Kebajikan kewargaan (<i>Civic Virtue</i>).	
Risiko	Tergelincir menjadi tirani pribadi.	Tergelincir menjadi korupsi faksi.	

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan antara model prinsipalitas dan model republikan terletak pada konteks politik, tujuan kekuasaan, aktor utama, metode mempertahankan stabilitas, dan risiko politik yang dihadapi. Dalam kondisi krisis, pemimpin tunggal diposisikan

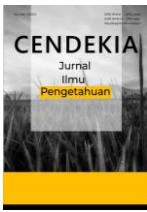
sebagai pusat pengambilan keputusan untuk menjamin keamanan internal melalui penggunaan *virtù* dan tindakan strategis, sedangkan pada situasi yang lebih stabil, keberlanjutan negara bergantung pada kebajikan kewargaan (*civic virtue*), hukum, dan institusi publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa Machiavelli memandang kepemimpinan sebagai sesuatu yang bersifat kontekstual, di mana bentuk kekuasaan berubah sesuai kebutuhan politik yang dihadapi negara.

Hasil pembacaan lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan antara pemimpin dan tuan/tiran dalam pemikiran Machiavelli tidak ditentukan oleh keras atau lunaknya tindakan politik, melainkan oleh orientasi penggunaan kekuasaan itu sendiri. Dalam teks ditemukan bahwa tindakan keras dapat diterima apabila diarahkan untuk menjaga keselamatan politik bersama, sedangkan tindakan yang ditujukan bagi ambisi personal diposisikan sebagai bentuk dominasi yang merusak legitimasi kekuasaan. Temuan ini tercermin melalui figur Agathocles dari Sisilia yang, meskipun memiliki kemampuan militer dan efektivitas politik, tidak memperoleh kemuliaan (*glory*) karena menggunakan kekerasan demi mempertahankan kepentingan pribadi melalui pembantaian warga negaranya. Dengan demikian, garis pembeda utama antara pemimpin dan tuan ditemukan pada orientasi tindakan politik terhadap kepentingan umum atau kepentingan personal.

Tabel 2. Garis Demarkasi antara Pemimpin dan Tuan dalam Etika Kekuasaan Machiavelli

Indikator	Pemimpin (Leader)	Tuan/Tiran (Master/Tyrant)	Dasar Interpretasi
Orientasi Kekuasaan	Kepentingan publik (<i>res publica</i>)	Ambisi dan dominasi personal	(Viroli, 1998)
Tujuan Penggunaan Kekuatan	Menjaga keselamatan dan stabilitas negara	Mempertahankan kekuasaan pribadi	(Machiavelli, 1513)
Hubungan dengan Hukum	Membangun institusi dan hukum yang bertahan	Menjadikan hukum alat kontrol	(Skinner, 1990)
Sumber Legitimasi	Kemanfaatan publik dan keamanan warga	Ketakutan dan dominasi koersif	(Berlin, 1972; Viroli, 1998)
Konsekuensi Politik	<i>Glory</i> (kemuliaan politik)	<i>Shame</i> atau delegitimasi moral-politik	(Viroli, 1998)
Contoh Teks	Pendiri negara yang membangun tatanan	Agathocles dari Sisilia	(Machiavelli, 1513)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, pemimpin dalam pemikiran Machiavelli diposisikan sebagai aktor yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi *res publica*, membangun hukum yang berkelanjutan, serta memperoleh legitimasi melalui kemanfaatan publik dan keamanan warga negara. Sebaliknya, tuan atau tiran menggunakan kekuasaan sebagai instrumen dominasi personal, menjadikan hukum sebagai alat kontrol, dan memperoleh legitimasi melalui rasa takut atau paksaan koersif. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak ditentukan oleh citra moral personal, melainkan oleh orientasi penggunaan kekuasaan terhadap kepentingan dan keselamatan bersama. Dengan demikian, perbedaan



antara pemimpin dan tiran dalam Machiavelli terutama bersifat fungsional-etik, bukan sekadar karakter personal.

Hasil pembacaan terhadap *Discorsi* menunjukkan bahwa ancaman utama republik tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari pembusukan internal berupa korupsi politik. Korupsi dipahami bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan melemahnya orientasi publik akibat dominasi kepentingan faksional yang membuat hukum kehilangan fungsi sebagai penjaga kepentingan bersama. Dalam kondisi ini, hukum cenderung berubah menjadi instrumen kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan, sementara keseimbangan sosial melemah. Oleh karena itu, Machiavelli menekankan pentingnya mekanisme institusional seperti Tribunus Plebis sebagai kanal kontrol yang membatasi dominasi elit sekaligus menjaga partisipasi warga. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas republik sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola konflik dan mencegah konsentrasi kekuasaan secara faksional.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dikotomi antara *Il Principe* dan *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* terlalu sederhana jika dipahami sebagai dua orientasi politik yang saling bertentangan. Machiavelli tidak menawarkan pilihan normatif antara pemerintahan personal dan republik, melainkan menjelaskan dua fase yang saling berkaitan dalam proses pembentukan, konsolidasi, dan pemeliharaan negara. Kajian mutakhir menegaskan bahwa *Il Principe* tidak semata-mata berbicara tentang kekuasaan personal, tetapi juga tentang figur pendiri (*ordinatore*) yang dibutuhkan dalam situasi krisis untuk membangun fondasi politik yang stabil (Barthas, 2021; Corradetti, 2025). Dengan demikian, kedua karya tersebut lebih tepat dipahami sebagai pendekatan komplementer, di mana *Il Principe* menekankan fase pendirian dan konsolidasi kekuasaan dalam kondisi darurat, sedangkan *Discorsi* menggarisbawahi keberlanjutan republik melalui institusi, hukum, dan mekanisme politik yang lebih stabil.

Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan personal dalam pemikiran Machiavelli tidak bersifat final, melainkan transisional menuju tatanan institusional yang lebih mapan. Setelah keteraturan politik berhasil dibangun, orientasi kekuasaan harus bergeser menuju penguatan institusi, sebagaimana ditegaskan dalam *Discorsi*, yang menempatkan hukum dan partisipasi warga negara sebagai fondasi utama keberlangsungan republik. Skinner menekankan bahwa kualitas pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan mempertahankan kekuasaan, tetapi terutama dari keberhasilannya membangun struktur politik yang mampu bertahan melampaui keberadaan dirinya. Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa *virtù* merupakan kapasitas adaptif yang memungkinkan seorang pemimpin merespons *fortuna* secara strategis demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan politik (Davis, 2023; Burelli, 2023). Oleh karena itu, *Il Principe* dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi darurat yang justru diarahkan untuk membuka jalan bagi terbentuknya tatanan republik yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Temuan berikutnya memperkuat adanya pergeseran orientasi dari kepemimpinan personal menuju supremasi hukum dan partisipasi warga negara sebagai fondasi republik. Skinner menegaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menciptakan institusi yang tidak bergantung pada figur individual, tetapi mampu bertahan dan bekerja secara otonom. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan dalam pemikiran Machiavelli terletak pada kemampuan membangun keteraturan politik yang berkelanjutan, bukan sekadar dominasi personal (Davis, 2023). Dengan demikian, relasi antara *Il Principe* dan



Discorsi dapat dipahami sebagai proses transisional menuju republik yang ditopang oleh hukum, keseimbangan sosial, dan institusi yang stabil (Corradetti, 2022; Dymond, 2025).

Relasi antara pemimpin dan tiran semakin memperjelas orientasi etik-politik tersebut dalam pemikiran Machiavelli. Viroli menegaskan bahwa *glory* diperoleh bukan melalui dominasi personal, melainkan melalui kemampuan menjaga kepentingan publik dan memperkuat institusi politik. Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa kebebasan politik hanya dapat dipertahankan melalui supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan individu dalam kerangka institusional (Schwabe, 2026). Figur seperti Agathocles menunjukkan bahwa efektivitas kekuasaan tanpa orientasi pada *common good* tidak menghasilkan kemuliaan politik yang sah (Tavera Villegas, 2024). Dengan demikian, legitimasi politik dalam Machiavelli ditentukan oleh kontribusi terhadap kepentingan bersama, bukan sekadar keberhasilan merebut atau mempertahankan kekuasaan (Geuna, 2024).

Pembacaan terhadap *Discorsi* juga menunjukkan bahwa ancaman utama terhadap republik bukan hanya berasal dari tekanan eksternal, tetapi terutama dari pembusukan internal institusi politik. Kajian mutakhir menegaskan bahwa korupsi sistemik dan melemahnya mekanisme pengawasan merupakan faktor utama yang menyebabkan keruntuhan republik (Vergara, 2021). Stabilitas republik sangat ditentukan oleh daya lenting institusi dalam mengelola konflik, mencegah dominasi faksional, dan menjaga keseimbangan kekuasaan (Schwabe, 2026). Machiavelli memahami korupsi sebagai hilangnya *civic virtue*, yakni ketika kepentingan umum tergantikan oleh kepentingan faksi atau kelompok tertentu. Dalam kondisi tersebut, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen publik dan konflik sosial tidak lagi menghasilkan keseimbangan politik yang produktif (Silva & Morais, 2021).

Temuan terakhir menunjukkan bahwa Machiavelli menawarkan etika tanggung jawab politik yang berbeda dari moralitas privat yang bersifat individual. Berlin menegaskan adanya ketegangan antara kebajikan personal dan kewajiban politik untuk menjaga keberlangsungan negara. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa problem utama dalam politik Machiavelli bukanlah ketiadaan etika, melainkan benturan antara moralitas personal dan tuntutan tanggung jawab publik (Giorgini, 2023). Oleh karena itu, tindakan politik dinilai sah sejauh diarahkan pada stabilitas, keselamatan, dan keberlangsungan negara, meskipun dalam kondisi tertentu membutuhkan keputusan yang keras atau tidak populer. Dengan demikian, etika Machiavelli dapat dipahami sebagai etika tanggung jawab publik yang menempatkan keberhasilan menjaga *res publica* sebagai dasar utama legitimasi kekuasaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika kekuasaan dalam pemikiran Niccolò Machiavelli tidak dapat direduksi sebagai legitimasi terhadap manipulasi politik atau kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Hasil pembacaan terhadap *Il Principe* dan *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* memperlihatkan bahwa kedua karya tersebut merepresentasikan dua konteks politik yang saling melengkapi, yakni kepemimpinan personal pada situasi krisis dan tata republik berbasis hukum pada kondisi stabil. Dalam kerangka tersebut, Machiavelli membedakan secara tegas antara pemimpin dan tuan melalui orientasi penggunaan kekuasaan: pemimpin menggunakan kekuasaan untuk membangun institusi, menjaga keselamatan publik, dan melindungi *res publica*, sedangkan tuan atau tiran menjadikan negara sebagai sarana dominasi personal. Penelitian ini juga menemukan bahwa korupsi politik dipahami Machiavelli sebagai pembusukan *civic virtue* yang melemahkan fungsi hukum dan memperbesar dominasi kepentingan faksional. Dengan demikian, etika Machiavelli lebih tepat dipahami sebagai etika



tanggung jawab publik yang menempatkan legitimasi kekuasaan pada kemampuan menjaga stabilitas, institusi, dan keberlangsungan kehidupan bersama, bukan semata pada moralitas privat penguasa.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini mengindikasikan pentingnya pembacaan yang lebih proporsional terhadap pemikiran Machiavelli, khususnya dalam memahami relasi antara kepemimpinan, institusi, dan kepentingan publik dalam tradisi republikanisme. Pembacaan mengenai korupsi sebagai pembusukan *civic virtue* juga membuka ruang refleksi mengenai pentingnya desain institusi politik yang mampu menjaga keseimbangan antara elite dan warga negara guna mencegah dominasi kepentingan faksional. Pada saat yang sama, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui eksplorasi konsep *humours*, *virtù*, dan *res publica* dalam konteks politik kontemporer, termasuk dinamika polarisasi politik digital, personalisasi kekuasaan, dan transformasi legitimasi politik di era demokrasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthas, J. (2021). Machiavelli's The Prince And The Question Of The Constitution. *La Pensée*, 406(2), 48–58. <https://doi.org/10.3917/lp.406.0048>
- Boñol, C. L. (2026). Niccolò Machiavelli's Political Theory: Acquiring Political Power Through Virtù. *Journal Of Contemporary Philosophical And Anthropological Studies*. <https://doi.org/10.59652/dvar9c98>
- Burelli, C. (2022). Political Normativity And The Functional Autonomy Of Politics. *European Journal Of Political Theory*, 21(4), 627–649. <https://doi.org/10.1177/1474885120918500>
- Burelli, C. (2023). No Virtue Like Resilience: Machiavelli's Realistic Justification Of Democracy. *Political Studies. Advance Online Publication*. <https://doi.org/10.1177/00323217231191396>
- Corradetti, C. (2022). The Solitude Of Machiavelli's Prince. *Philosophia*, 50(3), 1035–1053. <https://doi.org/10.1007/s11406-021-00460-1>
- Corradetti, C. (2025). Deconstructive Dynamism In Machiavelli's Prince. *Jus Cogens. Advance Online Publication*. <https://doi.org/10.1007/s42439-025-00102-0>
- Davis, E. A. (2023). A New Perspective On Machiavellian Leadership. *Political Research Quarterly*, 76(4), 1805–1813. <https://doi.org/10.1177/10659129231180190>
- Dymond, J. (2025). Machiavelli's State And Its Later Reception. *Jus Cogens*, 7, 113–130. <https://doi.org/10.1007/s42439-025-00105-x>
- Geuna, M. (2024). The “Common Good” In The Thought Of Niccolò Machiavelli. *Bollettino Della Società Filosofica Italiana*, 3, 9–36. <https://doi.org/10.23816/115643>
- Giorgini, G. (2023). Machiavellian Variations, Or When Moral Convictions And Political Duties Collide. *The Journal Of Ethics*, 27(4), 461–475. <https://doi.org/10.1007/s10892-023-09457-2>
- Leader Maynard, J. (2021). Political Realism As Methods Not Metaethics. *Ethical Theory And Moral Practice*, 25(3), 449–463. <https://doi.org/10.1007/s10677-021-10183-7>
- Maity, M., Roy, N., Majumder, D., & Chakravarty, P. (2024). Revisiting The Received Image Of Machiavelli In Business Ethics Through A Close Reading Of The Prince And Discourses. *Journal Of Business Ethics*, 191, 231–252. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05481-2>
- Mccormick, J. P. (2021). Aristocratic Insolenzia And The Role Of Senates In Machiavelli's Mixed Republic. *The Review Of Politics*, 83(4), 486–509. <https://doi.org/10.1017/s0034670521000486>



- Mendes, R. P. (2024). The Desire Not To Be Dominated And The Democratic Experience In Machiavelli. *Cadernos De Ética E Filosofia Política*, 43(1), 66–80.
<https://doi.org/10.11606/issn.1517-0128.v43i1p66-80>
- Regent, N. (2022). Quentin Skinner, Contextual Method And Machiavelli's Understanding Of Liberty. *History Of European Ideas*, 48(5), 735–751.
<https://doi.org/10.1177/09526951211049930>
- Schwabe, B. (2026). The Problem Of Gratitude And The Conditions Of Liberty In Machiavelli's Political Thought. *Political Research Quarterly. Advance Online Publication*. <https://doi.org/10.1177/10659129261441893>
- Silva, A. C., & Morais, R. M. De O. (2021). Maquiavel E O Governo Das Leis: A Relação Entre As Leis, As Instituições Políticas E O Conflito. *Revista Da Faculdade De Direito Da UFMG*, 78, 17–46. <https://doi.org/10.12818/p.0304-2340.2021v78p17>
- Sleat, M. (2022). Realism And Political Normativity. *Ethical Theory And Moral Practice*, 25(3), 465–478. <https://doi.org/10.1007/s10677-021-10239-8>
- Tavera Villegas, H. (2024). El Agatocles De Maquiavelo, Tres Versiones: Virtù Y Ejemplaridad En El Príncipe. *Isegoría*, 70, Article 1342.
<https://doi.org/10.3989/isegoria.2024.70.1342>
- Vatter, M. (2025). Machiavelli, Hellenistic Kingship, And The Legitimacy Of The Modern State. *Jus Cogens*, 7, 7–33. <https://doi.org/10.1007/S42439-025-00098-7>
- Vergara, C. (2021). Corruption As Systemic Political Decay. *Philosophy & Social Criticism*, 47(3), 322–346. <https://doi.org/10.1177/0191453719868265>